

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memudahkan penulisan dalam melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak", maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafie(2005:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaffar (Dalam Ndraha. 2010 : 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya menurut Musanef (Dalam Syafie,2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu sengan masyarakat yang kepentinganya diwakili oleh dinas itu.

Brasz(dalam Syafiie,2009: 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian–uraian defenisi tentang pengertian pemerintahan,secara etimologi pemerintaha dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang baik terdapat beberapa didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan di perintah memiliki kekuasaan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah,yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan cara hal atau urusan dari badan yang memrintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010: 6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat,baik individu dengan individu, kelompok dengan dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umumyang (a) meiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem

yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (Dalam Syafie,2005:21).

Rasyid (1998;14) mengemukakan bahwa tugas tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara- cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang terlebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Jadi menurut konsep-konsep yang telah dijelaskan mengenai pemerintahan dan dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah sekelompok organisasikenegaraan yang memiliki kekuasaan yang berkewajiban melindungi kebutuhan masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat, sedangkan pemerintah adalah badan lembaga dalam pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan negara yang telah ditentuka oleh undang undang yang berlaku.

3. Konsep Pemerintah

Sedangkan menurut Ndraha(2003: 5) pemerintah adalah sebuah proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Kemudian menurut Syafie (2005: 4) adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal ihkwal pe merintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
- c. Yang kedua pihak diperintah yaitu rakyat.
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Menurut Salam (2007: 3) pengertian pemerintah memiliki banyak arti :

- a. Pengertian pemerintah dalam arti luas yaitu pemerintah berdasarkan apa tugas yang dilaksanakan.
- b. Pengertian pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu kelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan segenap upaya masyarakat dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas

interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Salam 2007 ; 34)

4. Pemerintahan Desa

Berkaitan dengan pemerintahan yang terkandung dalam Pemerintahan Desa sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara, maka perlu dikemukakan pengertian dari pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa didasarkan atas asas :

- a. Kepastian hukum,
- b. Tertib penyelenggara pemerintahan,
- c. Tertib kepentingan umum,
- d. Keterbukaan,
- e. Proporsionalitas,
- f. Profesionalitas,
- g. Akuntabilitas,
- h. Efektifitas dan efisiensi,
- i. Kearifan lokal,
- j. Keberagaman, serta
- k. Partisipatif.

Menurut Berata Kusumah, (2004:24) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. Istilah Kepala

Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Menurut Widjaja, (2003:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Yulianti, (2003:24) Desa adalah tempat asal tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

5. Konsep Manajemen

Menurut GR.Therry (1987;3) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning, organizing, actuacing,dan controlling diaman pada masing-masing bidang digunakan baik dalam ilmu pengetahuan maupunkeahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Widjaya(1987;3) mengemukakan bahwa manajemen adalah salah satu dari unsur administrasi. Karena manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain, ini berarti suatu fungsi yang berhubungan dengan satu usaha untuk memperoleh hasil tertentu dengan melalui orang lain.

Sedangkan menurut Jhon D.Millet(dalam Sufian,2005:15) manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Siagian (2005) manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen menurut defenisi ini adalah merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan, kemampuan tersebut mencakup kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian,serta pengawasan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa manajemen bisa dilihat sebagai aktivitas. Aktivitas yang ada dimaksudkan untuk memadukan dan mengatur semua sumber daya yang dimiliki organisasi. Mengatur yang dimaksud tersebut terhadap sumber daya yang terdiri dari 6M yaitu man, money,menthods,machines,material,dan market (Hasibuan 2005)

6. Konsep Partisipasi

Seiring dengan pendapat Loekman Soetrisno(1995:208-209) mengatakan bahwa pertama: bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan bukan mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerja sama antara rakyat dengan pemerintah dalam melancarkan,melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kedua : untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam presepsi pemerintah terhadap pembangunan. Pembangunan haruslah dianggap sebagai suatu diamankan. Ketiga : untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik.

Menurut pendapat dari Loekman Soetrisno (1995: 222) defenisi lain tentang partisipasi raryat dalam pembangunan adalah merupakan kerjasama yang

erat antara dan rakyat dalam merencanakan,melaksanakan,melestarikan,dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menurut Mikkelsen (2001: 64) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melaksanakan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

Pandangan lainya dinyatakan oleh Mubyarto (1984: 35) “partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat.

Pandangan Mubyarto diatas menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat membantu diriya sendiri dalam membangun. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait.

7. Konsep Evaluasi.

Dalam hal pelaksanaan peran yang dijalankan oleh ketua rukun tetangga (RT) pada suatu lembaga pemerintahan, maka dalam pelaksanaanya diperlukan evaluasi untuk mengukur kinerja yang telah berjalan,penulis mengambil beberapa defenisi tentang teori evaluasi antara lain.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha 1989: 126)

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisis akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut Nurcholis (2004: 169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut Suharsimi Arikunto 2010 (2010:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dari beberapa pengertian evaluasi diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan biasanya evaluasi dapat kita jadikan suatu penilaian terhadap keseluruhan tugas/fungsi yang diperankan oleh RT, sehingga hasil dari penilaian

tersebut biasa dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerja RT pada masa yang akan datang.

8. Konsep Peranan.

Menurut Stotgil(Dalam Giroth,2004: 25), memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

9. Konsep Tugas

Menurut Moekijat (1998:2) Tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Sementara menurut Siagian (2005:126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan defenisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau orgaisasi demi mencapai tujuan tertentu.

10. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Mengutip dari yang ditemukan Selo Soemarjan (Dalam Poernomo, 2003:146) menurut pendapat beliau istilah “Lembaga” kecuali penunjukkan kepada suatu bentuk mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan menjadi ciri dari lembaga kemasyarakatan.

Menurut Soedjono Soekanto(Dalam Poernomo, 2003: 145) kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada suatu pokok kebutuhan manusia. Himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi hidupnya. Dengan kata lain kelembagaan sosial terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piranti untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sedangkan menurut Soekanto (Dalam Rauf, 2005:8) adalah himpunan norma-norma segala tingkatan yang suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi yang memiliki norma-norma dan tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya, dan hal tersebut juga berlaku bagi RT yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

11. Konsep Rukun Tetangga

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah, sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbeban oleh pemerintah saja.

Dalam melaksanakan pemerintah di daerah, pemerintah daerah dibantu oleh instansi-instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Antara lain lembaga Rukun Tetangga (RT). Namun didalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa lembaga Rukun Tetangga tidak termasuk kedalam sistem pemerintahan, realitanya Rukun Tetangga ini merupakan bagian yang tidak terlepas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah khususnya pemerintah kelurahan/Desa.

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administratif pemerintahan, dan dalam pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya (Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia).

Rukun Tetangga Menurut Soekanto adalah paguyuban karena tempat tinggal (Gemeinschaft of place) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-

orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong-menolong. (Dalam Rauf, 2005:8).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rukun tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang ada dikelurahan/Desa, serta diatur dan dibina oleh pemerintahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan kelurahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pendoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 14 RT dan RW mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Dan kelembagaan RT dan RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya.
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Dalam keempat tugas tersebut, maka terlihat bahwa tugas RT dan RW cukup berat, untuk itu tentunya dituntut kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan antara pengurus dengan anggota RT/RW. Atau masyarakat setempat agar segala tugas-tugas yang diembankan masyarakat setempat kepada pengurus RT tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan lancar dan baik.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan juga mengatur tentang tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga antara lain :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
- e. Menjabatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- g. Membuat laporan tertulis atas kerjanya kepada kepala Desa/lurah setiap akhir tahun.

Dari ketujuh tugas pokok diatas, maka terlihat bahwa pengurus RT dan RW memiliki tugas yang sangat berat, untuk itu tentunya dituntut kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan antara pengurus RT dan RW.

12. Konsep Kemasyarakatan.

Yang menjadi objek dalam pelaksanaan tugas RT adalah masyarakat. Menurut Linton (Dalam Rauf 2005 : 4) masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka mengorganisasikan diri dan sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.

Soekanto (2005: 126) menyatakan bahwa “dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok sosial, baik yang kecil

seperti kelompok keluarga, ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, dan masyarakat bangsa.

Berdasarkan pengertian masyarakat diatas dapat diambil suatu asumsi bahwa masyarakat merupakan bagian terpenting dalam RT, tanpa adanya masyarakat RT tidak dapat melaksanakan tugasnya dan tidak dapat menjalankan fungsinya.

13. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsiten dalam mencapai tujuan tertentu (Suhartono, 2005:7)

Menurut Anderson Mendefenidikan kebijakan sebagai prilaku dari sejumlah actor (Pejabat, Kelompok, Instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Dalam Indihono, 2009: 17)

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008: 7) Kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan.

Kebijakan publik menurut james Anderson (dalam Agustino.2008: 7) adalah serangkaian kegiatan kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

aktor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat secara terencana dengan tujuan agar dilaksanakan oleh seseorang/sekelompok orang. Hal tersebut juga dapat dilakukan oleh RT.

14. Konsep Kepemimpinan

Dalam proses pelayanan peran RT diperlukan Kepemimpinannya, adapun defenisi Kepemimpinan menurut (Parmudji, 2005 : 6) antara lain :

- a. Kepemimpinan itu nuasanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme.
- b. kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara sipemimpin dan pengikut dalam sistuasi tertentu sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang, jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut, sedangkan manajemen menekankan pada wewenang yang ada.
- c. Kepemimpinan megantungkan diri pada sumber-sumber yang ada pada dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dana dan daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efesien dan efektif.
- d. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan sipemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapainya tujuan organisasi, sedangkan manajemen mengarah kepada tercapainya tujuan organisasi, organisasi secara langsung, sifatnya selalu kolektif, sebab melayani kepentingan peroranganpun asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Yang Meneliti Tentang Rukun Tetangga

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian
1	Vijay Pirto	2016	Peranan Rukun Tetangga dalam membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Tengkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.
2.	M. Syawaluddin	2015	Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun
3	Dedi Susanto	2016	Analisi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kelurahan Selensan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

- a. Tempat penelitian yang berbeda
- b. Dasar hukum yang berbeda yang disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah. Untuk Penelitian nomor 1 Menggunakan Peraturan daerah Kota Pekanbaru No.12 Tahun 2002 Tentang RT dan RW, untuk penelitian nomor 2 Menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Kemudian untuk penelitian nomor 3 Menggunakan Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Sedangkan penelitian yang sedang berlangsung ini adalah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.

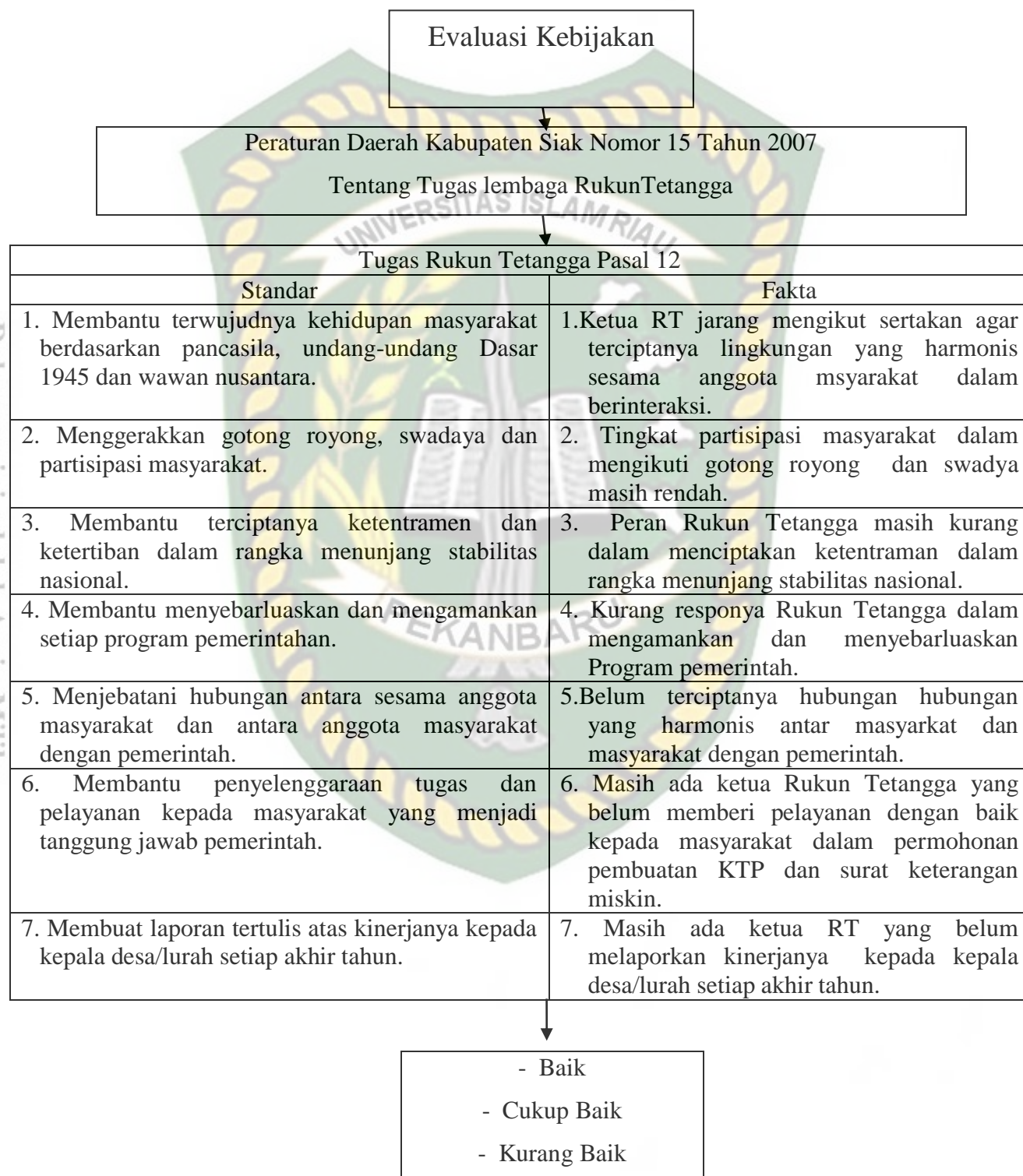
B. Kerangka Pikir.

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, untuk itu tentunya dituntut kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan antara pengurus dengan RT. Atau masyarakat setempat agar segala tugas-tugas berat yang diemban oleh masyarakat dan pemerintah kepada pengurus RT tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan lancar dan baik.

Oleh karena itu penulis akan menggambarkan kerangka pikir yang nantinya akan menjadi objek dalam pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Selanjutnya di sini dapat dilihat bagan dari kerangka pikir ini yaitu :

GAMBAR I.1 Kerangka pikir pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Peneliti 2018

C. Konsep Operasional

1. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penelitian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi dalam penelitian ini adalah proses pengukuran dan pengembangan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan.
2. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didesa dan kelurahan.
5. Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang saling berhubungan satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama dan mempunyai tujuan tertentu.
6. Penduduk setempat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga yang berangkutan.
7. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang dalam tugas dan fungsinya yaitu membantu pemerintah Desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha 2003:201) Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada(siagian 2003: 126)	Pelaksanaa Tugas Rukun Tetangga di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten siak (RT)	1.Membantu terwujudnya masyarakat berdasarkan pancasila UUD 1945 dan wawasan nusantara.	a.Menciptakan lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi. b.Menciptakan lingkungan yang madani	Ordinal
		2.Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.	a.Membersihkan lingkungan b.Kenyamanan lingkungan	Ordinal
		3.Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam menunjang stabilitas nasional	a.Menerapkan sikamling. b.menyelesaikan perselisihan antar warga.	Ordinal

1	2	3	4	5
		4.Membantu menyebarkan dan mengamankan setiap program pemerintahan	a.Sosialisasi program-program pemerintah. b.Mejaga program pemerintah	Ordinal
		5.Memjabatani hubungan antara sasama anggota masyarakat,dan antar anggota masyarakat dengan pemeritah.	a.Penghubung anantara sesama anggota masyarakat. b.Sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah	Ordinal
		6.Membantu pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah	. a. Surat keterangan miskin. b. Pembuatan KTP	Ordinal
		7. Membuat laporan pertanggungjawab an atas kinerjanya kepada kepala desa/lurah setiap akhir tahun.	a.Laporan pertanggungjawab an atas kinerjanya kepada kepala desa/lurah	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis,2018

D. Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis masing-masing indikator akan ditetapkan 3 (tiga) kategori ukuran yakni Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Adapun pengukuran variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Baik : Apabila RT mengikutsetakan masyarakat agar terciptanya Lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada $> 67\% - 100\%$

Cukup Baik : Apabila RT jarang mengikut sertakan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada $34\% - 66\%$.

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali mengikuti sertakan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang hermonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi, jumlah skor yang dinilai dalam

Sedangkan untuk pengukuran indikator dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila,UUD 1945 dan wawasan nusantara

Ukuran Penilaiannya adalah :

Baik : Apabila RT mengikutsetakan masyarakat agar terciptanya

Lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada $> 67\% - 100\%$

Cukup Baik : Apabila RT jarang mengikut sertakan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang harmonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada $34\% - 66\%$.

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali mengikuti sertakan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang hermonis sesama anggota masyarakat dalam berinteraksi, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori kurang baik adalah berada pada $1\% - 33\%$

2. Menggerakan gotong-royong, swadaya dan parisipasi masyarakat.

Ukuran penilaian adalah :

Baik : Apabila ketua RT dapat menjalankan program gotong-royong Swadaya dan partisipasi masyarakat (RT mengajak masyarakat untuk bekerjasama untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan nyaman), jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada $> 67\% - 100\%$

Cukup Baik : Apabila ketua RT kurang mendukung dan menjalankan program gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat (kurangnya himbauan dari ketua RT kepada masyarakat dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan nyaman), jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila ketua RT tidak sama sekali menjalankan program gotong-royong,swadaya dan partisipasi masyarakat (tidak adanya himbauan dari ketua RT kepada masyarakat dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan nyaman), jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori kurang baik adalah berada pada < 1% - 33%.

3.Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional. Ukuran penilaiannya :

Baik : Apabila RT mengajak masyarakat untuk ,menerapkan siskamling, dan RT ikut serta menyelesaikan perselisihan antar warga, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada > 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila RT jarang mengajak masyarakat untuk menerapkan siskamling, dan RT jarang ikut serta dalam menyelesaikan perselisihan antar warga, jumlah skor yang dinilai dalam setiap

indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali mengajak masyarakat untuk menerapkan siskamling, dan RT tidak sama sekali ikut serta menyelesaikan perselisihan antar warga, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori kurang baik adalah berada pada < 1% - 33%.

4. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerinahan.

Ukuran penelitiannya adalah :

Baik : Apabila RT ikut membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada > 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila RT jarang membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori kurang baik adalah berada pada < 1% - 33%.

5. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila RT ikut serta menjadi penghubung antara sesama anggota masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada $> 67\% - 100\%$

Cukup Baik : Apabila RT jarang ikut serta menjadi penghubung antara sesama anggota masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada $34\% - 66\%$.

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali ikut serta menjadi penghubung antara sesama anggota masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori kurang baik adalah berada pada $< 1\% - 33\%$.

6. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah .

Baik : Apabila RT ikut membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam permohonan pembuatan KTP dan surat keterangan miskin, jumlah skor yang dinilai dalam setiap

indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada > 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila RT jarang membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam permohonan pembuatan KTP dan surat keterangan miskin, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali membantu membrikan pelayanan kepada masyarakat dalam permohonan pembuatan KTP dan surat keterangan miskin, jumlah skoryang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori kurang baik adalah berada pada < 1% -3%.

7. Membuat laporan tertulis atas kinerjanya kepada Kepala desa /lurah setiap akhir tahun .

Baik : Apabila RT membuat laporan tertulis atas kinerjanya kepada kepala Desa/Lurah setiap akhir tahun, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori baik adalah berada pada > 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila RT jarang membuat laporan atas kinerjanya kepada Kepala Desa/ Lurah setiap akhir tahun, jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator penelitian pada kategori cukup baik adalah berada pada 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila RT tidak sama sekali membuat laporan atas kiskornerjanya kepada kepala Desa/lurah setiap akhir tahun,jumlah skor yang dinilai dalam setiap indikator peneliti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau